

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  
(BST) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN KALABBIRANG  
KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN TAKALAR)**

***EFFECTIVENESS OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM  
DISTRIBUTION (BST) DURING THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY  
OF KALABBIRANG KELURAHAN, PATTALASSANG DISTRICT, TAKALAR  
REGENCY***

**Rahmah Indawati**

Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar  
E-mail : rahmahema01@gmail.com

**ABSTRAK**

Efektivitas berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam suatu instansi, aktivitas ataupun program. Menurunnya Perekonomian Masyarakat bermula karena adanya pandemi Covid-19. Program Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang terkena wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, dan telaah dokumen. Narasumber berjumlah delapan orang, terdiri dari Pegawai Bidang Fakir Miskin, Lurah Kalabbirang dan Pegawai Bagian Data Kelurahan Kalabbirang serta lima masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai penelitian ini memberikan sembilan pertanyaan kepada instansi pemerintah terkait indikator efektivitas penyaluran dan lima pertanyaan terhadap pemantauan program BST. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Takalar efektif dan berjalan sesuai rencana, didukung oleh sejumlah indikator yang telah tercapai ialah ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program serta pemantauan program yang sudah dicapai sesuai rencana. Dinas sosial Kabupaten Takalar dan Kelurahan Kalabbirang sudah berperan aktif dalam Program Bantuan Sosial Tunai di kelurahan kalabbirang di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai, Pandemi-Covid-19

**ABSTRACT**

*Effectiveness is the determining factor in achieving a predetermined goal or target in an agency, activity, or program is. The community's economy has suffered a lot as a result of the Covid-19 pandemic. The Cash Social Assistance Program aims to improve the well-being of the community and to help the community's economy recover from the Covid-19 pandemic. This study applied a descriptive qualitative approach. The data in this study were obtained from interviews, document review. There were eight informants of the study, consisting of the employee of the unprosperous people division, the head of Kalabbirang Village and the employee of Kalabbirang Sub-District Data Section and five targeted receiver of cash social assistance. This study provided nine questions to government agencies regarding indicators of the effectiveness of distribution and five questions on monitoring the Cash Social Assistance program. The result of the study showed that implementation of the Cash Social Assistance program during the Covid-19 pandemic in Kalabbirang Village, Takalar Regency was effective and proceeded as planned. This nation is supported by a number of indicators, including the accuracy of program targets, achievement of program*

*objectives, and programs monitoring that have been accomplished as planned. During the Covid-19 pandemic, the Takalar Regency and Kalabirang Village social service offices were active participants in the cash social assistance program in the Kalabirang Village.*

**Keyword :** *Effectiveness, Cash Social Assistance, Pandemic Covid-19*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga perlu adanya peningkatan sebuah pembangunan untuk mendukung kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional ialah upaya meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperhatikan tantangan pembangunan global. Selain itu, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan percaya, serta untuk menyelenggarakan perekonomian guna mencapai keselamatan sosial. Menurut Pasal 33 UUD 1945, pasal ini merupakan peraturan untuk melaksanakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui peran dan koordinasi negara dalam meningkatkan derajat hidup rakyat, akan tetapi pada era sekarang perekonomian indonesia serta pembangunan nasional saat ini sedang melemah dikarenakan wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.

Corona virus ini atau yang sering disebut Covid-19 awal kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019.

Covid-19 ini ialah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia virus ini dapat memicu penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga bisa menyebabkan penyakit yang serius seperti sindrom pernapasan akut berat. Pandemi Covid-19 ini telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang Tahun 2020 serta mengharuskan masyarakat beraktivitas di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker saat bepergian sehingga kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini.

Mencemati hal tersebut, Pemerintah diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah menanggapi krisis ekonomi tersebut dengan memberikan bantuan darurat kepada rumah tangga atau per kepala keluarga, dengan bantuan tunai dan non tunai mewakili sebagian besar intervensi Bantuan Sosial, ialah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos yang merencanakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terkena wabah Covid-19 ini.

Bantuan tersebut senilai Rp. 600.000 per Kepala Keluarga pada gelombang 1 (April-Juni 2020), sebesar Rp. 300.000 pada gelombang 2 (Juli-Desember 2020), gelombang 3 (Maret 2020) sebesar

Rp.300.000, gelombang 4 ( Mei 2020 ) sebesar Rp. 300.000 dan saat ini sudah ke tahap gelombang 5 dan 6 (Juli-Agustus 2021).

Fenomena yang dirasakan dalam penyaluran BST kepada masyarakat adalah tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan masih hidup dalam kemiskinan akibat perilaku yang tidak adil dalam penyaluran BST yang seharusnya di Kecamatan Pattalassang yang di bawah garis kemiskinan menerima Bantuan Sosial Tunai secara keseluruhan akan tetapi 20% yang penerima bantuan di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tersebut di atas garis kemiskinan atau keluarga yang mampu, fenomena ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai pemimpinnya.

Pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran dikarenakan di Kabupaten Takalar informasi data penerima Bantuan Sosial Tunai tidak akurat. Ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik di setiap pembagian bantuan sosial. Beberapa faktor disangka menjadi pemicu ketidakakuratan data, yakni belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola

Kementerian Dalam Negeri, contohnya di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar yang seharusnya dalam tiap Kecamatan penerima BST ini sebanyak 100 Kepala Keluarga menjadi setengah dari penerima diakibatkan tidak validnya data Kartu Keluarga penerima.

Selain itu, fenomena lain yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang menerima bantuan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, contohnya kebanyakan masyarakat menggunakan uang bantuan tersebut untuk membeli keperluan yang tidak penting. (Merdeka.com, 2/3/21). Fenomena ini biasa menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan dan menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Meski tujuan dari rencana BST ini ialah dapat membantu masyarakat untuk hidup normal di tengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Serta yang menghambat penyaluran BST ialah persoalan data yang tidak akuntabel dan pemerintah kesusahan mengumpulkan data masyarakat miskin yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Bantuan Sosial Tunai sendiri juga tertera pada Pasal 14 UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Keamanan Sosial mengenai Proteksi Sosial ialah: (1) Perlindungan sosial memastikan bahwa seseorang, keluarga, kelompok, dan penduduk menghindari serta

mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial serta menutupi kelangsungan hidup mereka dengan kebutuhan dasar yang minimal, (2) Proteksi sosial sebagaimana diartikan pada Ayat (1) dilaksanakan lewat, (a) Dorongan sosial, (b) Advokasi sosial; serta/ ataupun, (c) Dorongan hukum. (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK ).

Pembangunan keamanan sosial, khususnya pengendalian kemiskinan, mewujudkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 “Anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara”. Maknanya, pemerintah bertanggung jawab atas anak terlantar dan fakir miskin. Penanggulangan kemiskinan adalah rencana prioritas nasional, sehingga pemerintah di semua tingkatan membutuhkan pemahaman dan komitmen yang sama. Pemahaman dan komitmen yang sama tentunya dapat mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh bagian bangsa dan negara, serta memerlukan aktivitas keras yang terorganisir untuk melaksanakan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, tugas penting negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan publik di bidang kesejahteraan rakyat didasarkan pada sejarah, ideologi, logika, dan pandangan universal.

Tujuan dari rencana BST tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat selama

masa pandemi dan memenuhi sedikit perekonomian masyarakat di masa pandemi. Namun, keberadaan program ini membawa banyak masalah. Seperti penempatan penerima bantuan yang tidak tepat, pemotongan dana BST secara sepihak, penciptaan peluang korupsi, konflik sosial, dan penyalahgunaan dana bantuan oleh masyarakat.

Pemberian dana BST ini diberikan untuk pemerintah kepada seluruh masyarakat yang berimbas wabah Covid-19. Termasuk di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Dari data yang ada angka kemiskinan semakin melonjak di masa pandemi ini. Perekonomian masyarakat menurun yang mengakibatkan kemiskinan meningkat akibat dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang bediam diri dirumah, sehingga merupakan masalah utama di negara berkembang dan memerlukan penanggulangan yang serius, kreatif, komprehensif dan berkelanjutan.

Masalah kemiskinan masih menjadi agenda serius yang harus dihadapi dan diatasi di kawasan perkotaan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk miskin Kabupaten Takalar dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terus meningkat menurut Survei Sosial Ekonomi (Susneas) Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2020 pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25,38 ribu jiwa sedangkan di Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 26,57 ribu jiwa.

Adapun data Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Takalar Kecamatan Pattalassang, Kelurahan Kalabi-rang pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Data Penerima BST yang tersalurkan di Kecamatan Pattalassang, Kelurahan Kallabirang**

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah BST yang Tersalurkan
Kalabbirang	1.235	303 KK	55 KK

**Sumber : Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 2021**

Pemberian BST di masa pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kendala dan keraguan apakah efektif pemberian BST. Pemberian BST tersebut bersifat komprehensif dan pendistribusian yang menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Takalar bagi keluarga di bawah garis kemiskinan, dan apakah bantuan tersebut dapat diklaim dengan baik.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai satu atau lebih tujuan tertentu. Efektivitas juga merupakan istilah yang lebih luas dan mencakup berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya tercermin dalam produktivitas, tetapi juga dalam pandangan dan sikap pribadi.

Efektivitas dicapai dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan melalui tinjauan input, proses, dan output. Sumber

daya adalah ketersediaan anggota, sarana, prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengukur efektivitas. (1) Pendekatan Sumber, Metode ini digunakan untuk menilai efektivitas input. Pendekatan perencanaan ini juga mengutamakan kesuksesan sebuah organisasi dalam pengadaan sumber daya fisik dan non fisik sesuai keperluan sebuah organisasi, (2) Pendekatan proses, menerapkan metode ini adalah untuk memverifikasi efektivitas penerapan rencana untuk seluruh rangkaian kegiatan dalam proses internal dan mekanisme organisasi, dan (3) pendekatan sasaran, tujuan dari metode ini adalah agar hasil atau hasil program sesuai dengan rencana.

Melihat seberapa efektif pelaksanaan program BST di masa pandemi Covid-19 dapat diukur menggunakan 4 indikator menurut (Budiani 2007) diantaranya yaitu ; Ketepatan sasaran program ialah keakuratan tujuan program sedemikian rupa sehingga peserta program mencapai tujuan tertentu. Saat ini, masyarakat sasaran utama adalah rakyat yang umumnya disebut KPM (Rumah Tangga Penerima).

Ketepatan pemilihan target KPM dapat mencapai target program BST. Hal ini sebagai upaya untuk mengukur kesesuaian rencana untuk kelompok sasaran atau KPM. Hal ini berdasarkan perubahan Keputusan Dirjen Masyarakat Miskin Nomor

22/6/SK/Hk.02.02/6/2020 tentang Revisi Keputusan Dirjen Untuk Masyarakat Miskin dan Revisi Petunjuk Teknis untuk penyaluran uang tunai guna merespon dampak bantuan sosial corona (Covid-19), kedua Sosialisasi Program dalam pelaksanaan program BST tersebut, tentunya sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu. Pada tahap ini, memberikan informasi kepada masyarakat tentang program BST sepanjang pandemi COVID-19.

Proses sosialisasi ialah salah satu proses penting—dalam penerapan rencana, karena masyarakat mengenali dengan jelas serta tujuan rencana lewat sosialisasi. Aspek ini mengukur uraian pemerintah terhadap rencana BST serta uraian KPM terhadap rencana tersebut. Ketiga tujuan program merupakan buat membenarkan kalau hasil penerapan program cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan. Tujuan dari program BST merupakan buat menunjang perekonomian warga yang terserang akibat wabah Covid-19 serta belum seluruhnya tercapai. Terakhir sehabis penerapan program BST dengan fokus gimana partisipan program BST berhubungan dengan warga terkena Covid- 19.

Setelah mengetahui dan memahami lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan suatu program maka peneliti memlih 4 indikator menurut Budiani karena menurut peneliti teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Adapun Teori kebijakan publik menurut beberapa ahli, Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik dan menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling terkait oleh badan dan lembaga pemerintah.

Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto, kebijakan adalah ketetapan yang berlaku oleh sikap yang tidak berubah- ubah serta kesekian, baik dari pihak yang membuatnya ataupun pihak yang menaatinya. Titmuss mendefenisikan kebijakan selaku prinsip- prinsip yang mengendalikan aksi yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman atau arahan bagi setiap usaha untuk mencapai suatu tujuan, sehingga setiap kegiatan mempunyai tindakan yang jelas.

Kebijakan adalah peraturan yang memuat berbagai prinsip pedoman cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tetentu.

Adapun istilah Publik (*public*) memiliki pengertian yang sangat bervariasi menurut pengertian umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian “umum” atau masyarakat, misalnya *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat) dan *public interest* (kepentingan umum). Adapun dalam pengertian “negara” ialah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara), dan *public sector* (sektor negara).

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010:24-25), menyampaikan jenis kebijakan yaitu, politik substansial dan politik prosedural. Politik substansial adalah politik yang mempengaruhi tindakan pemerintah. Kebijakan prosedural adalah cara untuk mengimplementasikan kebijakan penting, kebijakan distribusi dan regulasi dan kebijakan redistribusi kebijakan distribusi berkaitan dengan distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat. Pedoman regulasi berupa larangan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistribusi, di sisi lain, mengatur distribusi penghasilan, pendapatan, properti, maupun kekuasaan di antara kelompok masyarakat, politik material dan politik simbolik Politik material adalah politik yang

memberikan kelompok sasaran penggunaan sumber daya secara penuh. Kebijakan simbolik, ialah kebijakan yang membawa arti simbolis kepada kelompok sasaran, dan kebijakan barang publik (*public goods*) dan barang privat (*private goods*) kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang publik.

Adapun lima model kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Model Kebijakan, ditinjau dari aspek corak yang dikemukakan oleh Salisbury dan Heiz (Sharkansky, 1975) model kebijakan ini menjadi empat corak.

Corak yang pertama adalah kebijakan Distributif, ialah kebijakan yang menyampaikan hasil kepada suatu kelompok atau lebih. Kebijakan ini dibuat karena dasar adanya prosedur permintaan atau permohonan yang berjalan ataupun permasalahan yang dipandang relevan dengan kebutuhan sasaran kebijakan. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin, atau kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.

Corak yang kedua, kebijakan Redistributif, yaitu kebijakan yang memilah kembali sehingga memberikan hasil terhadap satu maupun sebagian kelompok sehingga menimbulkan kerugian terhadap kelompok lain. Satu pihak diberi keuntungan, tetapi pihak lain harus dikorbankan. Contohnya, kebijakan

pengurangan pajak bagi suatu perusahaan yang merugikan perusahaan lain.

Corak kebijakan yang ketiga adalah kebijakan *Regulatory*, yaitu kebijakan yang mengatur pemberian pembatasan terhadap perbuatan maupun perilaku dari satu atau lebih kelompok sehingga mengabaikan atau mengakui perolehan hasil tertentu untuk kelompok tertentu meskipun secara tidak langsung. Contohnya, kebijakan kuota yang sebenarnya merupakan kebijakan yang secara tidak langsung perolehan hasil bagi para jemaah haji sebab memberikan jaminan atas pengaturan yang baik.

Corak yang keempat adalah kebijakan *Self-regulatory*, yaitu kebijakan yang mengatur pribadi sendiri menentukan juga pembatasan terhadap perbuatan maupun tindakan dari satu atau lebih kelompok. Contohnya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya Model Kebijakan ditinjau dari aspek formal yang dikemukakan oleh Dunn (1981), model kebijakan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama Sinopsis Kebijakan, yaitu kebijakan yang menunjukkan perbandingan rasional.

Model kebijakan ini meyakini bahwa segala sesuatu selalu didasarkan pada pertimbangan rasional. Kedua adalah kebijakan inkremental, yang merupakan kebijakan dominan dalam praktiknya tetapi tidak banyak dijelaskan dalam literatur. Inkremental artinya meningkat secara

bertahap. Kebijakan inkremental pada praktiknya dapat dipahami sebagai pembuatan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja suatu negara, yang memperhitungkan pengetahuan yang terbatas tentang sumber pendapatan yang tepat dan jumlah pendapatan untuk memberikan kesan skeptis.

Selanjutnya aspek tipologi model kebijakan yang dikemukakan oleh Henry (1980), yaitu model yang dianalisis dari perspektif proses, yaitu model kelembagaan yang menitikberatkan pada struktur organisasi pemerintahan, misalnya peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam bentuk hukum. Kedua, model massa elit ini merupakan model kebijakan yang bersumber dari dominasi kelompok elit tertentu atas kepentingan dan posisi masyarakat luas. Ketiga model kelompok tersebut adalah kebijakan yang didasarkan pada kepentingan kelompok, dan konflik kepentingan akan muncul ketika kebijakan dirumuskan atau dilaksanakan di bawah pengaruh kepentingan yang berbeda. Model sistem keempat adalah strategi yang didasarkan pada pendekatan sistem dinamis, yaitu strategi yang terbentuk harus diawali dengan adanya masukan (input) dan kemudian menjadi keluaran (output).

Model kebijakan yang dianalisis dari sudut hasil. Pertama, model deskriptif yaitu model yang menjelaskan serta memprediksi faktor dan pengaruh dari pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk

memantau hasil dari langkah-langkah kebijakan. Kedua, model normatif adalah model yang tidak hanya didasarkan atas penyajian apa adanya, tetapi juga memberikan pernyataan-pernyataan yang seharusnya dilakukan. Ketiga, model strategi dari perspektif perubahan isi perubahan konten yang diharapkan, model strategi dapat muncul perubahan keseluruhan yang komprehensif dalam waktu yang cepat dan model mengalami perubahan dengan tahapan yang cepat.

Kebijakan yang berubah dengan cepat disebut sebagai kebijakan dengan model radikal, yaitu model perubahan yang komprehensif atau keseluruhan sistem yang berlaku untuk semua aspek dalam lingkup isi kebijakan. Perubahan bertahap disebut model reformis, yaitu model perubahan lambat dalam beberapa aspek yang melibatkan perubahan fungsi, posisi dan kebijakan pemerintah persatuan nasional yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah reformis. Dan terakhir Model kebijakan pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Dror (1968), yaitu model kebijakan perumusan atau pengambilan keputusan, meliputi lima model kebijakan yaitu model rasional ekonomi, model keputusan sekuensial, model kepuasan, model hiper-model rasional dan model optimal.

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian tersebut memiliki hubungan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang berlangsung

saat ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang” oleh Nindya Cahya Rosadi pada Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang tepatnya RT 02 RW 03 sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Namun, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pemberian Bantuan Sosial Tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti dilaksanakan, karena sama-sama meneliti terkait efektivitas bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19.

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” oleh Carly Erfly Fernando Maun pada Tahun 2020.

Pada penelitian ini terdapat konsep efektivitas, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), konsep kemiskinan, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin yang dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa BLT Dana Desa dari Kementerian Desa sedangkan BST merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan di masa pandemi Covid-19 berupa program bantuan sosial untuk di berikan kepada masyarakat miskin yang berdampak wabah pandemi Covid-19 ini. Salah satu bentuk programnya ialah Bantuan Sosial Tunai (BST), yang diberikan pada rakyat miskin, pengangguran, dan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak merebaknya pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan kepada 9.000.000 kepala keluarga dengan nilai Rp. 600.000 /bulan untuk jangka waktu 3 bulan, mulai April 2020 sampai Agustus 2021 senilai Rp. 300.000/bulan. Daerah penerima BST sebanyak 9.000.000 KK di 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Kriteria yang mendapatkan BST adalah KK dan usulan lainnya dari berbagai daerah yang pernah tercantum di Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI atau disebut DTKS.

Ada dua cara untuk penyaluran BST. Yaitu, melalui saluran BST tingkat komunitas yang menyalurkan BST melalui saluran BST Pos dan PT. POS Indonesia, melalui rekening KPM (keluarga penerima manfaat) lalu melalui Himbara (Perhimpunan Perbankan Negara).

## **METODE PENELITIAN**

Prosedur pendekatan penelitian yang akan dilakukan ialah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode deskriptif dikarenakan memfokuskan kepedulian pada kasus-kasus atau fakta-fakta yang ada pada saat penelitian atau kejadian yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Adapun jenis sumber keterangan yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data Primer ialah data yang didapat langsung contohnya teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam mengenai penyaluran Program Bansos Tunai di Kabupaten Takalar. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pedoman

wawancara yang berisi pertanyaan pokok yang sedang dipelajari. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait tentang penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Studi Dokumentasi.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen langsung kepada informan- informan terkait kegiatan-kegiatan pelayanan Bantuan Sosial Tunai, adapun 8 informan yang diwawancarai oleh peneliti meliputi informan pertama yaitu kepala seksi pendamping pemberdayaan masyarakat penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan pada bidang fakir miskin di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Takalar, informan kedua dan ketiga Lurah Kallabirang dan kepala seksi ekonomi dan kesejahteraan di Kelurahan kalabbirang serta informan lainnya yaitu masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai. Data Sekunder adalah data-data yang didapatkan dari penafsiran dalam bentuk printnan dan *softcopy* sampai dengan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Sebuah proses analisis data yang menggunakan dan mengembangkan pola-pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles &

Huberman (1992: 16). Artinya, (1) Reduksi data adalah kegiatan proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan abstraksi dan konversi data mentah dari catatan tertulis. Reduksi data akan terus dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai saat data dikumpulkan. (2) Penyajian data adalah proses penyuntingan informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Karena, data yang diperoleh berupa kalimat dan kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, maka penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis dan memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. (3) Jika pada saat kegiatan analisis data sedang berlangsung dan selesai, data akan dilakukan di Lapangan, dan setelah selesai di Lapangan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan mencapai kesimpulan. Hal ini, tentunya berdasarkan hasil analisis data baik dari catatan lapangan, observasi, maupun dokumentasi.

Agar mendapatkan kepercayaan atau kredibilitas yang sesuai dengan fakta di Lapangan, orang yang diwawancarai menggunakan teknologi inspeksi untuk memverifikasi hasil setelah mencatat hasil wawancara dalam daftar data. Membercheck mempertanyakan penerapan interpretasi data wawancara kepada satu atau dua orang dalam kunci untuk mengetahui apakah hasil interpretasi konsisten dengan maksud orang dalam kunci.

## HASIL PENELITIAN

Dinas Sosial Kabupaten Takalar di Jl. Kalabirang, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar, di bawah arahan Sekretaris Daerah setempat sebagai penanggung jawab pelayanan, melaksanakan pengembangan implementasi kebijakan, mengembangkan standar, standar prosedur, memberikan bimbingan teknis dan pengawasan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan, dan persetujuan adalah tugas utama. Bidang sosial melaporkan keselamatan dan keamanan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin. Tahun 2019, Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Takalar sudah terintegrasi dan kini menjadi satu.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi Dinas Sosial Kabupaten Takalar yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan penyelenggaraan Dinas Sosial yang bersih, jujur dan transparan, memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan misi Dinas Sosial Kabupaten

Takalar yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas, jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kalabbirang merupakan sebuah Kelurahan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001, Kecamatan Pattallassang (Kawasan Metropolitan), lalu diubah sesuai dengan Perda No. 3 tanggal 27 April 2007 dan 27 April 2007. Berdasarkan Perda No. 5 dari Tahun 2007, dimekarkan menjadi dua kecamatan baru, yaitu kecamatan Sanrobone (perluasan dari kabupaten Mappakasunggu) dan kecamatan Galesong (pemekaran dari kabupaten Galesong Selatan dan kabupaten Galesong Utara), terbentuk kembali. Seperti yang telah disebutkan, Kabupaten Takalar sejauh ini terdiri dari sembilan kecamatan. Sembilan kecamatan ini membawahi 82 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk +252.275 jiwa.

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di saat pandemi Covid-19 diukur menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiana 2007. Menurut pandangan Budiana untuk mendapatkan seberapa efektif pelaksanaan program BST di masa pandemi

Covid-19 dapat diukur menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran, Sosialisasi proyek, tujuan proyek, dan pemantauan proyek. Berdasarkan analisis data empat indikator efektivitas pelaksanaan program BST, yaitu:

#### **Ketepatan Sasaran**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran BST sudah sangat tepat, namun penyalurannya tidak dilakukan secara keseluruhan masyarakat kabupaten Takalar dan penerima bantuan BST ada 9366 orang yang terbagi atas 15 kecamatan.

#### **Sosialisasi Program**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa belum ada sosialisasi mengenai penyaluran BST, hanya saja sebagian masyarakat banyak yang melihat bantuan seperti ini di siaran berita TV dan masyarakat disekitar yang memberi informasi.

#### **Tujuan Program**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program BST tersebut untuk meringankan beban masyarakat saat pandemi.

#### **Pemantauan Program**

Berdasarkan wawancara keempat informan dan hal senada lainnya dapat disimpulkan bahwa pemantauan program berjalannya BST ini sudah direalisasikan berdasarkan data di Kelurahan dan DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

### **PEMBAHASAN**

Bersumber pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Pattalassang Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Takalar dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan peneliti akan melakukan pembahasan sesuai teori dalam pembahasan ini akan disajikan dengan permasalahan yang diteliti.

Tingkat keefektifitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan menginterpretasi. Mengukur keefektifitasan sebuah program dibutuhkan empat indikator untuk mendapatkan seberapa efektif penerapan program BST di saat pandemi Covid-19 diantaranya ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Indikator pertama yaitu Ketepatan Sasaran program ialah sasaran ataupun sasaran dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai partisipan program di Kelurahan Kallabirang dengan niat agar program ini jadi program yang bisa menolong warga miskin yang terkena pandemi Covid-19 ataupun kurang sanggup yang terdapat di Kabupaten Takalar Kelurahan Kalabbirang. Pada riset ini ketepatan penentuan siapa saja sasaran program Dorongan Sosial Tunai ialah warga miskin serta berakibat pandemi Covid-19 Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang

diseleksi lewat sebagian kriteria bagi standar BPS.

Teori yang digunakan dalam riset ini, bersumber pada Teori dimensi daya guna yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), pada penanda ketepatan sasaran program ialah dengan memandang sepanjang mana informasi penerima program Dorongan Sosial Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Takalar cocok dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh kriteria BPS serta informasi DTKS. Menurut teori atau pendapat lain yaitu Duncan (dalam Steers, 1985:53) menerangkan perihal ukuran efektivitas yaitu perolehan tujuan yang mengemukakan bahwa pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses ketepatan sasaran program ini dinilai telah pas sasaran walaupun belum seluruhnya.

Dari hasil pengamatan di Lapangan warga miskin dari sasaran penerima memanglah telah dicoba pendataan dari Pemerintah khususnya di Kelurahan Kalabbirang, tetapi dari hasil riset yang dicoba, periset menciptakan kalau pendataan tidak dicoba secara langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Takalar melainkan oleh pihak Desa serta Kelurahan. Sejalan dengan teori tersebut juga berdasarkan hasil wawancara terhadap informan-informan di atas, menganggap bahwa ketepatan sasaran program Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan

Pattallassang Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Takalar sudah tepat dikarenakan masyarakat penerima BST ini tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Non-DTKS sebagai keluarga penerima manfaat.

Indikator kedua yaitu sosialisasi program sejalan dengan hasil temuan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar serta lingkungan Kelurahan Kalabbirang. Sosialisai program ialah titik dini yang memastikan keberhasilan program. Hal tersebut dicoba untuk memandang keahlian penyelenggara program Bantuan Sosial Tunai dalam melaksanakan sosialisasi tersebut, sehingga data program BST bisa tersampaikan kepada warga penerima program.

Indikator selanjutnya yakni Sosialisasi Program. Sosialisasi Program ialah keahlian Dinas Sosial Kabupaten Takalar dalam melakukan sosialisasi program Dorongan Sosial Tunai, sehingga data program bisa tersampaikan kepada warga. Serta menurut teori atau pendapat lain yaitu menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengutarakan tentang ukuran efektivitas yaitu Integrasi dimana tingkatan terhadap tkemampuan suatu organisasi akan membuat sosialisasi, ekspansi kesepakatan dan komunikasi serta berbagai macam organisasi lainnya.

Sosialisasi program dinilai belum efektif dan maksimal karena Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Takalar tidak

melakukan sosialisasi secara langsung karena pemerintah takut berdesak-desakan saat pandemi, sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui tujuan dari program tersebut. Masyarakat hanya bisa mengetahui melalui TV penyiar tentang program BST ini. Sejalan dengan teori tersebut kelima informan menganggap sosialisasi program Bantuan Sosial Tunai dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 ini sehingga pemerintah membuat program tersebut agar membantu atau meringankan perekonomian masyarakatnya. Serta kelima informan tersebut mengetahui adanya program BST ini di media-media lainnya seperti berita televisi, koran dan sosial media internet.

Indikator ketiga yaitu tujuan program, sejalan dengan hasil temuan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar serta lingkungan kelurahan kalabbirang, Tujuan ialah aspek utama dalam memastikan daya guna sesuatu program, ialah apakah tujuan yang sudah direncanakan cocok dalam penerapannya. Tujuan dari program Baantuan Sosial Tunai ini merupakan buat menolong perekonomian warga yang terkena wabah pandemi Covid- 19.

Sesuai teori dimensi daya guna yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi serta Mutiarin (2017), bahwa pencapaian tujuan program ialah buat mengenali sepanjang mana kesesuaian antara hasil penerapan program Dorongan Sosial Tunai di

Dinas Sosial Kabupaten Takalar dengan tujuan yang sudah diresmikan.

Bersumber pada tujuan yang sudah diresmikan dalam program Dorongan Sosial Tunai ini sudah terangkum sebagian kegiatan-kegiatan yang diadakan Dinas Sosial dalam program BST ini berbentuk pendataan warga yang belum memperoleh program Dorongan Sosial Tunai ini dinilai telah efisien disebabkan bisa menggapai tujuan tujuan yang diharapkan, program BST di Dinas Sosial Kabupaten Takalar sangat menolong kelompok warga yang terpengaruh pandemi Covid-19, dilihat dari program BST bisa meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan warga pada waktu pandemi, memberdayakan warga serta meningkatkan kerjasama dalam kelompok melalui berbagai informasi-informasi tentang BST. Sesuai dengan teori tersebut, ketiga informan menganggap tujuan dari adanya program BST ini ialah meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 sudah terlaksana.

Indikator keempat yang menjadi indikator terakhir yaitu pemantauan program sejalan dengan hasil temuan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar serta lingkungan Kelurahan Kalabbirang, Pemantauan ialah pengawasan yang dilaksanakan pada program Dorongan Sosial Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, dicoba selaku wujud atensi kepada warga.

Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi sejauh mana penerapannya. Program ini berbeda dengan rencana yang telah diresmikan, sehingga dikenal kekurangannya dan setelah itu mencari pemecahan dari permasalahan itu. Pada riset ini, bersumber pada teori dimensi daya guna yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi serta Mutiarin (2017), pada kegiatan pemantauan program ialah aktivitas yang dilaksanakan sehabis aktivitas program dicoba selaku wujud atensi pelaksana program kepada penerima program Bantuan Sosial Tunai. Menurut teori atau pendapat lain yaitu menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) menerangkan mengenai perihal ukuran efektivitas yaitu Adaptasi dimana kemampuan organisasi atau orang penerima BST untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pemantauan ini dinilai telah lumayan efisien dalam penerapannya, pemantauan dicoba lewat komunikasi langsung dengan partisipan program serta pemantauan yang dicoba secara berkala oleh Pemerintah. Tetapi, para ilmuwan masih menciptakan kenyataan di lapangan masih banyaknya warga yang terlambat menemukan Bantuan Sosial Tunai, hal tersebut sangat disayangkan, terlebih pada masa Covid-19 ini warga sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah, hendak lebih baik lagi bila Pemerintah Desa serta Dinas Sosial melaksanakan inovasi dalam proses pemantauan penerapan program ini.

Sejalan dengan teori tersebut, dari hasil wawancara kepada informan dapat disimpulkan bahwa pemantauan program Bantuan Sosial Tunai ini berjalan sesuai rencana dan tepat dikarenakan Kelurahan yang menangani dan memantau berjalannya program yang berperan adil dalam pemantauan kegiatan baik dengan cara turun lapang dan data-data yang dipersiapkan dalam syarat pengurusan BST.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyaluran program Bantuan Sosial Tunai disaat pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar terbukti efektif penyalurannya dikarenakan dapat dilihat dari indikator efektivitas penyaluran yaitu indikator pertama ketepatan sasaran dalam Program Bantuan Sosial Tunai ini sudah tepat penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat yang tercatat di data DTKS, indikator kedua adalah sosialisasi program pada Pemerintah membuat program BST ini dikarenakan adanya wabah Covid-19 dan masyarakat mengetahui BST ini melalui media-media lain, indikator ketiga adalah tujuan program adanya BST ini yaitu meringankan perekonomian masyarakat yang terkena wabah Covid-19 ini dan indikator keempat adalah pemantauan program berjalannya kegiatan

BST sudah direali-sasikan secara menyeluruh dikarenakan masyarakat sebagai penerima BST telah memenuhi syarat dan data sebagai keluarga penerima dan sudah disalurkan bantuannya secara keseluruhan.

Berdasarkan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan maka diajukan beberapa saran yaitu : (1) Bagi Pemerintah agar menambah dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat agar masyarakat lebih berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (2) Bagi Instansi Kelurahan Kallabbirang agar pelayanan pengurusan berkas-berkas sebagai syarat penerima BST lebih cepat agar masyarakat yang mengurus tidak menunggu terlalu lama. (3) Bagi Masyarakat agar tidak berdesak-desakan dalam pengurusan BST ini baik di kelurahan atau di tempat pengambilan dana bantuan tersebut.

## REFERENSI

- Al-Zikrillah. (2020). Sistem Ekonomi Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1, 5.
- Alviyanzah, F. (2019). Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
- Amalia R, (2015). Efektivitas Pelayanan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas sosial kota makassar
- Beni. (2016). Teori Efektivitas, 69. Retrieved from [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153\\_BAB\\_II\\_SAMPAI\\_BAB](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB_II_SAMPAI_BAB)

TERAKHIR.pdf

- CNN Indoensia. (2020). Update Corona per 24 Agustus : 155.412 Positif, 111.060 Sembuh. Inform Database : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824090837>
- Emerson dalam saputra. (2017). Efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palangka raya
- Erfly Fernando Maun, Carly. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Manado : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Gerston (2014), dalam Islamy, Irfan. 2014. "Definisi Dan Makna Kebijakan Publik." ADPU4410/Modul 1: 1–41.
- Harwidiensyah. (2011). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Makassar: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Merdeka.com. (2021). Bima Arya : Ada Penerima Bansos Tunai Pakai Uang untuk Beli Baju Lebaran. <https://m.merdeka.com/uang/bima-arya-ada-penerima-bansos-tunai-pakai-uang-untuk-beli-baju-lebaran.html>
- Miles, B. M. & Huberman, M., (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP -20-538515/update-corona-24-agustus-155412-positif-111060-sembuh
- Nuryahdi. (2020). Kebijakan Non Penal Pihak Sekolah Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar SMA di Kubu Raya. E-Jurnal Fatwa Hukum.

- <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/38603>
- Publicuho, J. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA, 4(1), 19–26. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Putra, Agung Aldino. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama. Palu : Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako.